



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 185);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
6. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

7. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan daerah yang meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah.
9. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah seluruh Pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi Hibah, dan darurat dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah bagian laba dari badan usaha milik Daerah dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
13. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah penerimaan Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
14. Belanja Pegawai adalah Belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
16. Belanja Hibah adalah belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
18. Belanja Operasional adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
19. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
20. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
21. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rencana Pendapatan Daerah, rencana Belanja Daerah, dan rencana Pembiayaan Daerah yang terinci sampai subrincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
23. Daerah adalah Kota Pariaman.
24. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
25. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp685.364.466.101,00 (enam ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus satu rupiah).
- (2) APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Daerah sebesar Rp656.864.466.101,00 (enam ratus lima puluh enam milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus satu rupiah);
 - b. Belanja Daerah sebesar Rp685.364.466.101,00 (enam ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus satu rupiah); dan
 - c. Pembiayaan neto sebesar Rp28.500.000.000,00 (Dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp50.514.504.873,00 (lima puluh milyar lima ratus empat belas juta lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp603.925.961.228,00 (enam ratus tiga milyar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp2.424.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp12.040.000.000,00 (dua belas milyar empat puluh juta rupiah);
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp13.400.696.065,00 (tiga belas milyar empat ratus juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh lima rupiah);
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp9.986.510.155,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu seratus lima puluh lima rupiah); dan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp 15.087.298.653,00 (lima belas milyar delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
 - a. transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp567.456.204.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus empat ribu rupiah); dan
 - b. transfer antar Daerah sebesar Rp36.469.757.228,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pendapatan Hibah sebesar Rp2.424.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Belanja Operasional sebesar Rp525.722.473.071,00 (lima ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah);
- b. Belanja Modal sebesar Rp71.406.126.239,00 (tujuh puluh satu milyar empat ratus enam juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan
- d. Belanja Transfer Rp86.735.866.791,00 (delapan puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp326.974.868.973,00 (tiga ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

- Rp178.221.172.833,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- c. Belanja Hibah sebesar Rp19.833.791.265,00 (sembilan belas milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah); dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp692.640.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. Belanja Modal peralatan dan mesin sebesar Rp12.957.259.187,00 (dua belas milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja Modal bangunan dan gedung sebesar Rp29.651.881.243,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);
 - c. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp27.628.795.809,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah); dan
 - d. Belanja Modal aset tetap lainnya sebesar Rp1.168.190.000,00 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil sebesar Rp2.041.174.571,00 (dua milyar empat puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
 - b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp84.694.692.219,00 (delapan puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah).



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan sebesar Rp28.500.000.000,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah); dan
- b. pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yaitu SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp28.500.000.000,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Pariaman ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah;
- b. Lampiran II memuat rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah;
- c. Lampiran III memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi Hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi Hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi Hibah;
- e. Lampiran V memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi Bantuan Sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan Sosial;
- f. Lampiran VI memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi Bantuan Sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan Sosial;
- g. Lampiran VII memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

- i. Lampiran IX daftar memuat nama penerima, alamat, dan besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten;
- j. Lampiran X memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kota;
- k. Lampiran XI memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah desa;
- l. Lampiran XII memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII memuat rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 10

Penjabaran APBD dalam Peraturan Wali Kota ini harus ditindaklanjuti dengan pembentukan DPA SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sepengetahuan Pejabat Wali Kota Pariaman.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 77

DAFTAR ISI

- b. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah;
- c. Lampiran II memuat rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah;
- d. Lampiran III memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi Hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi Hibah;
- e. Lampiran IV memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi Hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi Hibah;
- f. Lampiran V memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi Bantuan Sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan Sosial;
- g. Lampiran VI memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi Bantuan Sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan Sosial;
- h. Lampiran VII memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- i. Lampiran VIII memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- j. Lampiran IX daftar memuat nama penerima, alamat, dan besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten;
- k. Lampiran X memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kota;
- l. Lampiran XI memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah desa;
- m. Lampiran XII memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah; dan
- n. Lampiran XIII memuat rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
 NOMOR 77 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KOTA PARIAMAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
 PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH,
 DAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4	Pendapatan Daerah	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp50.514.504.873,00
4.1.01	Pajak Daerah	Rp12.040.000.000,00
4.1.01.06	pajak hotel	Rp100.000.000,00
4.1.01.06.01	pajak hotel	Rp100.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	pajak hotel	Rp100.000.000,00
4.1.01.07	pajak restoran	Rp1.500.000.000,00
4.1.01.07.01	pajak restoran dan sejenisnya	Rp1.500.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	pajak restoran dan sejenisnya	Rp1.500.000.000,00
4.1.01.08	pajak hiburan	Rp20.000.000,00
4.1.01.08.02	pajak pagelaran kesenian/ musik/ tari/ busana	Rp20.000.000,00
4.1.01.08.02.0001	pajak pagelaran kesenian/ musik/ tari/ busana	Rp20.000.000,00
4.1.01.09	pajak reklame	Rp110.000.000,00
4.1.01.09.01	pajak reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron	Rp110.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	pajak reklame papan/ billboard/ videotron / megatron	Rp110.000.000,00
4.1.01.10	pajak penerangan jalan	Rp4.680.000.000,00
4.1.01.10.02	pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	Rp4.680.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	pajak penerangan jalan sumber Lain	Rp4.680.000.000,00
4.1.01.11	pajak parkir	Rp30.000.000,00
4.1.01.11.01	pajak parkir	Rp30.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	pajak parkir	Rp30.000.000,00
4.1.01.14	pajak mineral bukan logam	Rp500.000.000,00

4.1.01.14.37	pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya	Rp500.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya	Rp500.000.000,00
4.1.01.15	pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2)	Rp2.400.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	Rp2.400.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	Rp2.400.000.000,00
4.1.01.16	bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Rp2.700.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-pemindahan hak	Rp2.700.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-pemindahan hak	Rp2.700.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp13.400.696.065,00
4.1.02.01	retribusi jasa umum	Rp7.653.950.347,00
4.1.02.01.01	retribusi jasa umum	Rp5.028.950.347,00
4.1.02.01.01.0001	retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas	Rp328.950.347,00
4.1.02.01.01.0005	retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Rp4.700.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan	Rp960.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan	Rp960.000.000,00
4.1.02.01.04	retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	Rp1.000.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum	Rp1.000.000.000,00
4.1.02.01.05	retribusi pelayanan pasar	Rp300.000.000,00
4.1.02.01.05.0003	retribusi kios	Rp300.000.000,00
4.1.02.01.06	retribusi pengujian kendaraan bermotor	Rp150.000.000,00
4.1.02.01.06.0001	retribusi pengujian kendaraan bermotor	Rp150.000.000,00
4.1.02.01.11	retribusi pelayanan tera/tera ulang	Rp15.000.000,00
4.1.02.01.11.0001	retribusi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya	Rp15.000.000,00

4.1.02.01.13	retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	Rp200.000.000,00
4.1.02.01.13.0001	retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	Rp200.000.000,00
4.1.02.02	retribusi jasa usaha	Rp5.241.745.718,00
4.1.02.02.01	retribusi pemakaian kekayaan daerah	Rp1.341.745.718,00
4.1.02.02.01.0001	retribusi penyewaan tanah dan bangunan	Rp179.160.000,00
4.1.02.02.01.0003	retribusi penyewaan	Rp16.164.718,00
4.1.02.02.01.0004	retribusi pemakaian	Rp1.000.000.000,00
4.1.02.02.01.0005	retribusi pemakaian ruangan	Rp96.421.000,00
4.1.02.02.01.0007	retribusi pemakaian alat	Rp50.000.000,00
4.1.02.02.02	retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan	Rp1.800.000.000,00
4.1.02.02.02.0002	retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan	Rp1.800.000.000,00
4.1.02.02.05	retribusi tempat khusus parkir	Rp350.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	retribusi pelayanan tempat khusus parkir	Rp350.000.000,00
4.1.02.02.07	retribusi rumah potong hewan	Rp50.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	retribusi pelayanan rumah potong hewan	Rp50.000.000,00
4.1.02.02.09	retribusi tempat rekreasi dan olahraga	Rp1.500.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga	Rp1.500.000.000,00
4.1.02.02.11	retribusi penjualan produksi usaha daerah	Rp200.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan	Rp200.000.000,00
4.1.02.03	retribusi perizinan tertentu	Rp505.000.000,00
4.1.02.03.03	retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum	Rp5.000.000,00
4.1.02.03.03.0001	retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum	Rp5.000.000,00
4.1.02.03.07	retribusi persetujuan bangunan gedung	Rp500.000.000,00

4.1.02.03.07.0001	retribusi persetujuan bangunan gedung	Rp500.000.000,00
4.1.03	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp9.986.510.155,00
4.1.03.01	dividen atas penyertaan modal pada BUMN	Rp998.651.015.500,00
4.1.03.01.01	dividen atas penyertaan modal pada BUMN	Rp998.651.015.500,00
4.1.03.01.01.0001	dividen atas penyertaan modal pada BUMN	Rp998.651.015.500,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	Rp15.087.298.653,00
4.1.04.01	hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan	Rp530.000.000,00
4.1.04.01.08	hasil penjualan aset lain- lain	Rp530.000.000,00
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	Rp530.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	Rp2.000.000.000,00
4.1.04.05.01	jasa giro pada kas daerah	Rp2.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	jasa giro pada kas daerah	Rp2.000.000.000,00
4.1.04.07	pendapatan bunga	Rp2.500.000.000,00
4.1.04.07.01	pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah	Rp2.500.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah	Rp2.500.000.000,00
4.1.04.08	penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah	Rp2.250.000.000,00
4.1.04.08.01	tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara	Rp2.250.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara	Rp2.250.000.000,00
4.1.04.16	pendapatan BLUD	Rp7.730.798.653,00
4.1.04.16.02	pendapatan BLUD dari jasa layanan	Rp7.730.798.653,00
4.1.04.16.02.0001	pendapatan BLUD dari jasa layanan	Rp7.730.798.653,00
4.1.04.19	pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir	Rp71.500.000,00
4.1.04.19.01	pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir	Rp71.500.000,00

4.1.04.19.01.0001	pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir	Rp71.500.000,00
4.1.04.21	pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah	Rp5.000.000,00
4.1.04.21.01	pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah	Rp5.000.000,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Rp5.000.000,00
4.2	Pendapatan Transfer	Rp603.925.961.228,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp567.456.204.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	Rp527.380.968.000,00
4.2.01.01.01	dana transfer umum- dana bagi hasil (DBH)	Rp10.758.502.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH pajak bumi dan bangunan	Rp742.977.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	Rp4.037.833.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH sumber daya alam (SDA) pengusahaan panas bumi	Rp133.689.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-landrent	Rp628.378.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan- provisi sumber daya hutan (PSDH)	Rp4.006.875.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	Rp1.208.750.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp412.646.363.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	Rp412.646.363.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp40.767.944.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Rp259.471.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Rp1.338.307.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Rp2.913.828.000,00
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	Rp896.394.000,00

4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	Rp371.700.000,00
4.2.01.01.03.0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	Rp8.029.616.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Rp26.958.628.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp63.208.159.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Rp13.729.300.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Rp1.045.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	Rp30.287.145.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Rp252.068.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Rp1.954.200.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Rp1.197.100.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Rp372.901.000,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	Rp612.881.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Rp397.530.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Rp3.173.252.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp520.000.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Rp3.956.057.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Rp5.710.725.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	Rp40.075.236.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	Rp40.075.236.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	Rp40.075.236.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp36.469.757.228,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	Rp36.469.757.228,00

4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil pajak	Rp36.469.757.228,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil pajak Kendaraan Bermotor	Rp8.281.274.613,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp4.561.153.280,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp14.175.130.425,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil pajak Air Permukaan	Rp85.265.137,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil pajak Rokok	Rp9.366.933.773,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp2.424.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	Rp2.424.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Rp2.424.000.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Rp2.424.000.000,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Rp2.424.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp656.864.466.101,00
5	Belanja Daerah	
5.1	Belanja Operasi	Rp524.722.473.071,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp325.974.868.973,00
5.1.01.01	belanja gaji dan tunjangan ASN	Rp201.278.528.196,00
5.1.01.01.01	belanja gaji pokok ASN	Rp145.432.464.127,00
5.1.01.01.01.0001	belanja gaji pokok PNS	Rp138.607.171.689,00
5.1.01.01.01.0002	belanja gaji Pokok PPPK	Rp6.825.292.438,00
5.1.01.01.02	belanja tunjangan keluarga ASN	Rp13.548.493.875,00
5.1.01.01.02.0001	belanja tunjangan keluarga PNS	Rp12.798.981.755,00
5.1.01.01.02.0002	belanja tunjangan keluarga PPPK	Rp749.512.120,00
5.1.01.01.03	belanja tunjangan jabatan ASN	Rp4.588.544.231,00
5.1.01.01.03.0001	belanja tunjangan jabatan PNS	Rp4.588.544.231,00
5.1.01.01.04	belanja tunjangan fungsional ASN	Rp11.507.311.565,00
5.1.01.01.04.0001	belanja tunjangan fungsional PNS	Rp11.224.263.065,00

5.1.01.01.04.0002	belanja tunjangan fungsional PPPK	Rp283.048.500,00
5.1.01.01.05	belanja tunjangan fungsional umum ASN	Rp2.806.137.463,00
5.1.01.01.05.0001	belanja tunjangan fungsional umum PNS	Rp2.806.137.463,00
5.1.01.01.06	belanja tunjangan beras ASN	Rp7.778.071.718,00
5.1.01.01.06.0001	belanja tunjangan beras PNS	Rp7.542.800.864,00
5.1.01.01.06.0002	belanja tunjangan beras PPPK	Rp235.270.854,00
5.1.01.01.07	belanja tunjangan PPH/ tunjangan khusus ASN	Rp339.764.529,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp339.764.529,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp2.378.890,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp2.324.456,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp54.434,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp13.794.001.993,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp13.197.029.896,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp596.972.097,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp370.271.718,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp353.891.016,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp16.380.702,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp1.110.815.087,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp1.061.672.981,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp49.142.106,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp273.000,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp273.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp71.060.273.994,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp41.204.211.675,00

5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp39.953.517.142,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Rp1.250.694.533,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp4.402.071.608,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp4.402.071.608,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	Rp1.454.351.316,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	Rp1.454.351.316,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp23.999.639.395,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp19.765.823.715,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Rp4.233.815.680,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp38.566.002.720,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan pajak Daerah	Rp505.680.000,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan pajak hotel	Rp4.200.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan pajak Restoran	Rp63.000.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan pajak Hiburan	Rp840.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan pajak Reklame	Rp4.620.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan pajak Penerangan Jalan	Rp196.560.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan pajak Parkir	Rp1.260.000,00

5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp21.000.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	Rp100.800.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp113.400.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp351.613.320,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp40.320.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp42.000.000,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	Rp12.600.000,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp6.300.000,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	Rp630.000,00
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp8.400.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp56.353.320,00

5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Rp75.600.000,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	Rp14.700.000,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	Rp2.100.000,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp63.000.000,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	Rp8.400.000,00
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Rp210.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	Rp21.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	Rp30.287.145.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	Rp30.287.145.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	Rp252.068.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	Rp252.068.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Rp2.250.415.146,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Rp2.250.415.146,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp4.400.255.683,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp4.347.950.683,00

5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp42.105.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Rp10.200.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	Rp518.825.571,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp518.825.571,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	Rp6.738.388.681,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	Rp473.854.500,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	Rp473.854.500,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	Rp37.260.090,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	Rp37.260.090,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	Rp51.099.552,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	Rp51.099.552,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	Rp44.000.775,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	Rp44.000.775,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	Rp638.011.238,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	Rp638.011.238,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	Rp84.375.428,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	Rp84.375.428,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	Rp41.640.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	Rp41.640.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp1.719.900.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp1.719.900.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	Rp378.000.000,00

5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	Rp378.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp801.091,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp801.091,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp1.080.996.007,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	Rp90.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	Rp1.137.248,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	Rp3.411.752,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	Rp986.447.007,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Rp2.088.450.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Rp2.088.450.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	Rp100.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	Rp100.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Rp445.849.156,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	Rp91.316.400,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	Rp91.316.400,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Rp8.783.544,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Rp8.783.544,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Rp156.114.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Rp156.114.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	Rp9.422.870,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	Rp9.422.870,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Rp978.905,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Rp978.905,00

5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Rp4.592,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Rp4.592,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	Rp10.248.558,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	Rp10.248.558,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Rp219.159,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Rp219.159,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	Rp657.478,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	Rp657.478,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan pajak Daerah	Rp96.320.000,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan pajak hotel	Rp800.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan pajak Restoran	Rp12.000.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan pajak Hiburan	Rp160.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan pajak Reklame	Rp880.000,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan pajak Penerangan Jalan	Rp37.440.000,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan pajak Parkir	Rp240.000,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp4.000.000,00

5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Rp19.200.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp21.600.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	Rp66.973.966,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp7.680.000,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp8.000.000,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	Rp2.400.000,00
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp1.200.000,00
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	Rp120.000,00
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp1.600.000,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp10.733.966,00

5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Rp14.400.000,00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	Rp2.800.000,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	Rp400.000,00
5.1.01.05.11.0022	belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga	Rp12.000.000,00
5.1.01.05.11.0024	belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah	Rp1.600.000,00
5.1.01.05.11.0027	belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum	Rp40.000,00
5.1.01.05.11.0031	belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung	Rp4.000.000,00
5.1.01.05.12	belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH	Rp4.809.684,00
5.1.01.05.12.0002	belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan bagi KDH	Rp4.809.684,00
5.1.01.06	belanja dana operasional peminan DPRD serta KDH/WKDH	Rp477.050.426,00
5.1.01.06.01	belanja dana operasional pimpinan DPRD	Rp113.040.000,00
5.1.01.06.01.0001	belanja dana operasional pimpinan DPRD	Rp113.040.000,00
5.1.01.06.02	belanja dana operasional KDH/WKDH	Rp364.010.426,00

5.1.01.06.02.0001	belanja dana operasional KDH/WKDH	Rp364.010.426,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	Rp1.832.018.000,00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	Rp1.832.018.000,00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	Rp1.832.018.000,00
5.1.01.99	belanja pegawai BLUD	Rp5.576.757.800,00
5.1.01.99.99	belanja pegawai BLUD	Rp5.576.757.800,00
5.1.01.99.99.9999	belanja pegawai BLUD	Rp5.576.757.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp178.221.172.833,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp39.611.528.846,00
5.1.02.01.01	belanja barang pakai habis	Rp38.005.769.571,00
5.1.02.01.01.0001	belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi	Rp159.847.150,00
5.1.02.01.01.0002	belanja bahan-bahan kimia	Rp402.869.640,00
5.1.02.01.01.0004	belanja bahan-bahan bakar dan pelumas	Rp7.308.743.110,00
5.1.02.01.01.0008	belanja bahan- bahan/bibit tanaman	Rp22.547.500,00
5.1.02.01.01.0009	belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran	Rp15.880.000,00
5.1.02.01.01.0010	belanja bahan-isi tabung gas	Rp140.915.000,00
5.1.02.01.01.0011	belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan	Rp74.030.000,00
5.1.02.01.01.0012	belanja bahan-bahan lainnya	Rp2.760.255.671,00
5.1.02.01.01.0013	belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan	Rp380.908.007,00
5.1.02.01.01.0015	belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran	Rp121.994.915,00
5.1.02.01.01.0019	belanja suku cadang-suku cadang alat pertanian	Rp5.300.000,00
5.1.02.01.01.0022	belanja suku cadang-persediaan dari belanja bantuan sosial	Rp5.000.000,00
5.1.02.01.01.0023	belanja suku cadang- suku cadang lainnya	Rp7.500.000,00
5.1.02.01.01.0024	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	Rp1.915.162.701,00

5.1.02.01.01.0026	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	Rp3.526.316.439,00
5.1.02.01.01.0027	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos	Rp28.850.000,00
5.1.02.01.01.0029	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	Rp1.080.018.491,00
5.1.02.01.01.0030	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor	Rp276.614.250,00
5.1.02.01.01.0031	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik	Rp1.426.616.915,00
5.1.02.01.01.0032	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas	Rp877.786.000,00
5.1.02.01.01.0034	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan pendukung olahraga	Rp214.373.000,00
5.1.02.01.01.0035	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata	Rp58.200.000,00
5.1.02.01.01.0036	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Rp344.238.224,00
5.1.02.01.01.0037	belanja obat-obatan-obat	Rp1.136.066.040,00
5.1.02.01.01.0038	belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya	Rp996.587.400,00
5.1.02.01.01.0039	belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	Rp4.745.632.200,00
5.1.02.01.01.0045	belanja natura dan pakan-natura dan pakan lainnya	Rp1.126.903.818,00
5.1.02.01.01.0052	belanja makanan dan minuman rapat	Rp4.503.553.100,00
5.1.02.01.01.0053	belanja makanan dan minuman jamuan tamu	Rp437.600.000,00
5.1.02.01.01.0055	belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan	Rp4.050.000,00

5.1.02.01.01.0056	belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan	Rp288.915.000,00
5.1.02.01.01.0057	belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial	Rp5.175.000,00
5.1.02.01.01.0058	belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan	Rp2.678.220.000,00
5.1.02.01.01.0061	belanja pakaian sipil harian (PSH)	Rp99.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	belanja pakaian sipil lengkap (PSL)	Rp70.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	belanja pakaian dinas harian (PDH)	Rp40.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	belanja pakaian dinas lapangan (PDH)	Rp531.100.000,00
5.1.02.01.01.0066	belanja pakaian dinas upacara (PDU)	Rp12.000.000,00
5.1.02.01.01.0070	belanja pakaian pelatihan kerja	Rp16.500.000,00
5.1.02.01.01.0074	belanja pakaian adat daerah	Rp27.500.000,00
5.1.02.01.01.0076	belanja pakaian olahraga	Rp133.000.000,00
5.1.02.01.04	belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi	Rp1.605.759.275,00
5.1.02.01.04.0037	belanja peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan bermotor angkutan barang	Rp695.520.000,00
5.1.02.01.04.0120	belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih	Rp199.275,00
5.1.02.01.04.0406	belanja peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-komputer unit lainnya	Rp11.040.000,00
5.1.02.01.04.0510	belanja gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor	Rp872.000.000,00

5.1.02.01.04.0517	belanja gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah	Rp25.000.000,00
5.1.02.01.04.0698	belanja jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi	Rp2.000.000,00
5.1.02.01.04.0710	belanja aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- bahan perpustakaan tercetak-buku umum	Rp0,00
5.1.02.02	belanja jasa	Rp82.112.322.479,00
5.1.02.02.01	belanja jasa kantor	Rp61.856.427.927,00
5.1.02.02.01.0003	honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia	Rp3.771.911.000,00
5.1.02.02.01.0004	honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	Rp2.489.740.000,00
5.1.02.02.01.0005	honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara	Rp67.600.000,00
5.1.02.02.01.0006	honorarium penyuluhan atau pendampingan	Rp1.369.914.000,00
5.1.02.02.01.0009	honorarium penyelenggara ujian	Rp37.800.000,00
5.1.02.02.01.0011	honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan	Rp54.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	honorarium tim anggaran pemerintah daerah	Rp1.086.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	belanja jasa tenaga pendidikan	Rp4.552.850.000,00
5.1.02.02.01.0014	belanja jasa tenaga kesehatan	Rp1.201.742.000,00
5.1.02.02.01.0015	belanja jasa tenaga laboratorium	Rp704.079.000,00
5.1.02.02.01.0017	belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Rp4.951.650.000,00

5.1.02.02.01.0018	belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan	Rp340.600.000,00
5.1.02.02.01.0019	belanja jasa tenaga penanganan bencana	Rp888.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	belanja jasa tenaga perhubungan	Rp1.396.360.000,00
5.1.02.02.01.0023	belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan	Rp62.421.950,00
5.1.02.02.01.0025	belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan	Rp345.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	belanja jasa tenaga administrasi	Rp5.594.040.000,00
5.1.02.02.01.0028	belanja jasa tenaga pelayanan umum	Rp4.622.340.971,00
5.1.02.02.01.0029	belanja jasa tenaga ahli	Rp4.061.612.474,00
5.1.02.02.01.0030	belanja jasa tenaga kebersihan	Rp5.779.390.000,00
5.1.02.02.01.0031	belanja jasa tenaga keamanan	Rp705.625.000,00
5.1.02.02.01.0033	belanja jasa tenaga supir	Rp1.372.290.000,00
5.1.02.02.01.0034	belanja jasa tenaga juru masak	Rp450.590.000,00
5.1.02.02.01.0037	belanja jasa juri perlombaan/pertandingan	Rp420.050.000,00
5.1.02.02.01.0039	belanja jasa tenaga informasi dan teknologi	Rp636.200.000,00
5.1.02.02.01.0041	belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik	Rp81.725.000,00
5.1.02.02.01.0042	belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan	Rp230.000.000,00
5.1.02.02.01.0044	belanja jasa pelayanan perpustakaan	Rp6.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	belanja jasa kontribusi asosiasi	Rp1.028.250.000,00
5.1.02.02.01.0049	belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga	Rp48.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	belanja jasa kalibrasi	Rp49.470.000,00
5.1.02.02.01.0051	belanja jasa pengolahan sampah	Rp6.000.000,00
5.1.02.02.01.0052	belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi	Rp8.000.000,00

5.1.02.02.01.0053	belanja jasa pengukuran tanah	Rp2.500.000,00
5.1.02.02.01.0055	belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan	Rp248.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	belanja tagihan telepon	Rp67.406.000,00
5.1.02.02.01.0060	belanja tagihan air	Rp168.718.000,00
5.1.02.02.01.0061	belanja tagihan listrik	Rp4.206.964.732,00
5.1.02.02.01.0062	belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	Rp1.130.575.800,00
5.1.02.02.01.0063	belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan	Rp351.180.640,00
5.1.02.02.01.0064	belanja paket/pengiriman	Rp799.000,00
5.1.02.02.01.0067	belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan	Rp473.780.000,00
5.1.02.02.01.0068	belanja rekening penerangan jalan umum	Rp3.660.850.200,00
5.1.02.02.01.0069	belanja pengolahan air limbah	Rp636.600.000,00
5.1.02.02.01.0071	belanja lembur	Rp1.570.665.000,00
5.1.02.02.01.0073	belanja medical check up	Rp40.000.000,00
5.1.02.02.01.0075	belanja insentif tenaga kesehatan penanganan covid-19	Rp878.437.160,00
5.1.02.02.02	belanja iuran jaminan/asuransi	Rp13.152.934.552,00
5.1.02.02.02.0003	belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta pbpu dan bp kelas 3	Rp10.995.418.000,00
5.1.02.02.02.0004	belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pbpu dan bp kelas 3	Rp924.033.600,00
5.1.02.02.02.0005	belanja iuran jaminan kesehatan bagi non asn	Rp257.626.080,00
5.1.02.02.02.0006	belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non asn	Rp133.560.456,00
5.1.02.02.02.0007	belanja iuran jaminan kematian bagi non asn	Rp71.488.908,00
5.1.02.02.02.0010	belanja iuran jaminan hari tua bagi non asn	Rp318.227.508,00
5.1.02.02.02.0011	belanja iuran jaminan pensiun bagi non asn	Rp660.000,00

5.1.02.02.02.0012	belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja rentan	Rp269.000.000,00
5.1.02.02.02.0013	belanja iuran jaminan kematian bagi pekerja rentan	Rp182.920.000,00
5.1.02.02.03	belanja sewa tanah	Rp71.000.000,00
5.1.02.02.03.0005	belanja sewa tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga	Rp71.000.000,00
5.1.02.02.04	belanja sewa peralatan dan mesin	Rp2.502.000.000,00
5.1.02.02.04.0001	belanja sewa tractor	Rp10.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	belanja sewa kendaraan bermotor penumpang	Rp423.000.000,00
5.1.02.02.04.0037	belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang	Rp27.000.000,00
5.1.02.02.04.0049	belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang	Rp24.500.000,00
5.1.02.02.04.0132	belanja sewa peralatan studio audio	Rp606.500.000,00
5.1.02.02.04.0355	belanja sewa peralatan umum	Rp1.229.000.000,00
5.1.02.02.04.0404	belanja sewa komputer jaringan	Rp54.000.000,00
5.1.02.02.04.0406	belanja sewa komputer unit lainnya	Rp128.000.000,00
5.1.02.02.05	belanja sewa gedung dan bangunan	Rp3.625.655.000,00
5.1.02.02.05.0001	belanja sewa bangunan gedung kantor	Rp218.290.000,00
5.1.02.02.05.0002	belanja sewa bangunan gudang	Rp6.720.000,00
5.1.02.02.05.0009	belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	Rp1.312.570.000,00
5.1.02.02.05.0041	belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan	Rp3.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	belanja sewa hotel	Rp2.085.075.000,00
5.1.02.02.07	belanja sewa aset tetap lainnya	Rp157.500.000,00
5.1.02.02.07.0013	belanja sewa audio visual	Rp157.500.000,00
5.1.02.02.08	belanja jasa konsultasi konstruksi	Rp170.000.000,00
5.1.02.02.08.0002	belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur- jasa desain arsitektural	Rp10.000.000,00

5.1.02.02.08.0015	belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah	Rp160.000.000,00
5.1.02.02.09	belanja jasa konsultasi non konstruksi	Rp19.500.000,00
5.1.02.02.09.0002	belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-transportasi	Rp19.500.000,00
5.1.02.02.10	belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment)	Rp2.500.000,00
5.1.02.02.10.0008	belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) infrastruktur telekomunikasi dan informatika	Rp2.500.000,00
5.1.02.02.12	belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan	Rp554.805.000,00
5.1.02.02.12.0001	belanja kursus singkat/pelatihan	Rp200.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	belanja sosialisasi	Rp51.305.000,00
5.1.02.02.12.0003	belanja bimbingan teknis	Rp153.500.000,00
5.1.02.02.12.0004	belanja diklat kepemimpinan	Rp150.000.000,00
5.1.02.03	belanja pemeliharaan	Rp12.086.945.711,00
5.1.02.03.01	belanja pemeliharaan tanah	Rp200.000.000,00
5.1.02.03.01.0017	belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga	Rp200.000.000,00
5.1.02.03.02	belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	Rp5.962.443.547,00
5.1.02.03.02.0003	belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator	Rp30.000.000,00
5.1.02.03.02.0012	belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- alat besar darat lainnya	Rp88.400.000,00
5.1.02.03.02.0018	belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung- alat besar apung lainnya	Rp10.000.000,00

5.1.02.03.02.0022	belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set	Rp58.489.400,00
5.1.02.03.02.0034	belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya	Rp25.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan	Rp1.628.500.000,00
5.1.02.03.02.0036	belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang	Rp715.000.000,00
5.1.02.03.02.0037	belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang	Rp125.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua	Rp149.000.000,00
5.1.02.03.02.0039	belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga	Rp1.000.000,00
5.1.02.03.02.0040	belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus	Rp235.000.000,00
5.1.02.03.02.0052	belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya	Rp135.200.000,00
5.1.02.03.02.0068	belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya	Rp43.900.000,00
5.1.02.03.02.0096	belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor	Rp48.998.827,00

5.1.02.03.02.0116	belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor	Rp35.490.000,00
5.1.02.03.02.0117	belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya	Rp16.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin	Rp79.000.000,00
5.1.02.03.02.0123	belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use)	Rp8.000.000,00
5.1.02.03.02.0132	belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio	Rp25.000.000,00
5.1.02.03.02.0204	belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum	Rp90.653.000,00
5.1.02.03.02.0367	Belanja Pemeliharaan Alat laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	Rp40.750.000,00
5.1.02.03.02.0404	belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan	Rp1.528.472.320,00
5.1.02.03.02.0405	belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer	Rp268.550.000,00
5.1.02.03.02.0406	belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya	Rp52.500.000,00
5.1.02.03.02.0410	belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan Jaringan	Rp50.300.000,00

5.1.02.03.02.0411	belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya	Rp140.240.000,00
5.1.02.03.02.0494	belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu- rambu lalu lintas darat- rambu-rambu lalu lintas darat lainnya	Rp334.000.000,00
5.1.02.03.03	belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	Rp4.682.749.164,00
5.1.02.03.03.0001	belanja pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung kantor	Rp1.810.243.908,00
5.1.02.03.03.0006	belanja pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan	Rp190.000.000,00
5.1.02.03.03.0010	belanja pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat pendidikan	Rp2.339.496.860,00
5.1.02.03.03.0032	belanja pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat kerja- bangunan fasilitas umum	Rp200.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	belanja pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat kerja-taman	Rp143.008.396,00
5.1.02.03.04	belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi	Rp1.241.753.000,00
5.1.02.03.04.0004	belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota	Rp360.000.000,00
5.1.02.03.04.0005	belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa	Rp75.000.000,00
5.1.02.03.04.0023	belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya	Rp42.000.000,00
5.1.02.03.04.0031	belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya	Rp645.793.000,00

5.1.02.03.04.0071	belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor	Rp8.960.000,00
5.1.02.03.04.0074	belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya	Rp90.000.000,00
5.1.02.03.04.0119	belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa	Rp10.000.000,00
5.1.02.03.04.0125	belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi	Rp10.000.000,00
5.1.02.04	belanja perjalanan dinas	Rp15.877.229.550,00
5.1.02.04.01	belanja perjalanan dinas dalam negeri	Rp15.877.229.550,00
5.1.02.04.01.0001	belanja perjalanan dinas biasa	Rp3.418.925.000,00
5.1.02.04.01.0003	belanja perjalanan dinas dalam kota	Rp2.332.203.550,00
5.1.02.04.01.0004	belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	Rp323.900.000,00
5.1.02.04.01.0005	belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	Rp9.802.201.000,00
5.1.02.05	belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	Rp12.902.642.407,00
5.1.02.05.01	belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	Rp3.654.909.407,00
5.1.02.05.01.0001	belanja hadiah yang bersifat perlombaan	Rp545.300.000,00
5.1.02.05.01.0002	belanja penghargaan atas suatu prestasi	Rp1.669.800.000,00
5.1.02.05.01.0003	belanja beasiswa	Rp997.000.000,00
5.1.02.05.01.0006	belanja bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian	Rp52.800.000,00
5.1.02.05.01.0011	belanja uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat	Rp390.009.407,00
5.1.02.05.02	belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	Rp9.247.733.000,00

5.1.02.05.02.0001	belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain	Rp7.377.384.000,00
5.1.02.05.02.0002	belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat	Rp1.870.349.000,00
5.1.02.88	belanja barang dan jasa bos	Rp9.904.113.140,00
5.1.02.88.88	belanja barang dan jasa bos	Rp9.904.113.140,00
5.1.02.88.88.8888	belanja barang dan jasa bos	Rp9.904.113.140,00
5.1.02.99	belanja barang dan jasa blud	Rp5.726.390.700,00
5.1.02.99.99	belanja barang dan jasa blud	Rp5.726.390.700,00
5.1.02.99.99.9999	belanja barang dan jasa blud	Rp5.726.390.700,00
5.1.05	belanja hibah	Rp19.833.791.265,00
5.1.05.01	belanja hibah kepada pemerintah pusat	Rp13.941.261.265,00
5.1.05.01.01	belanja hibah uang kepada pemerintah pusat	Rp13.941.261.265,00
5.1.05.01.01.0001	belanja hibah uang kepada pemerintah pusat	Rp13.941.261.265,00
5.1.05.05	belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia	Rp5.051.300.000,00
5.1.05.05.01	belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan	Rp1.497.100.000,00
5.1.05.05.01.0001	belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan	Rp1.497.100.000,00
5.1.05.05.02	belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar	Rp1.954.200.000,00

5.1.05.05.02.0001	belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar	Rp1.954.200.000,00
5.1.05.05.06	belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia	Rp1.600.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia	Rp1.600.000.000,00
5.1.05.07	belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik	Rp841.230.000,00
5.1.05.07.01	belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik	Rp841.230.000,00
5.1.05.07.01.0001	belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik	Rp841.230.000,00
5.1.06	belanja bantuan sosial	Rp692.640.000,00
5.1.06.01	belanja bantuan sosial Kepada individu	Rp692.640.000,00
5.1.06.01.01	belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu	Rp692.640.000,00
5.1.06.01.01.0001	belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu	Rp692.640.000,00
5.2	Belanja Modal	Rp71.406.126.239,00
5.2.02	belanja modal peralatan dan mesin	Rp12.957.259.187,00
5.2.02.01	belanja modal alat besar	Rp112.500.000,00
5.2.02.01.03	belanja modal alat bantu	Rp112.500.000,00
5.2.02.01.03.0016	belanja modal alat bantu lainnya	Rp112.500.000,00
5.2.02.02	belanja modal alat angkutan	Rp2.000.000.000,00
5.2.02.02.01	belanja modal alat angkutan darat bermotor	Rp2.000.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	belanja modal kendaraan bermotor khusus	Rp2.000.000.000,00
5.2.02.03	belanja modal alat bengkel dan alat ukur	Rp450.800.000,00
5.2.02.03.01	belanja modal alat bengkel bermesin	Rp450.800.000,00

5.2.02.03.01.0010	belanja modal alat bengkel bermesin lainnya	Rp450.800.000,00
5.2.02.04	belanja modal alat pertanian	Rp35.000.000,00
5.2.02.04.01	belanja modal alat pengolahan	Rp35.000.000,00
5.2.02.04.01.0009	belanja modal alat-alat peternakan	Rp35.000.000,00
5.2.02.05	belanja modal alat kantor dan rumah tangga	Rp2.454.134.052,00
5.2.02.05.01	belanja modal alat kantor	Rp1.372.673.000,00
5.2.02.05.01.0005	belanja modal alat kantor lainnya	Rp1.372.673.000,00
5.2.02.05.02	belanja modal alat rumah tangga	Rp1.081.461.052,00
5.2.02.05.02.0001	belanja modal mebel	Rp518.800.000,00
5.2.02.05.02.0003	belanja modal alat pembersih	Rp6.468.932,00
5.2.02.05.02.0004	belanja modal alat pendingin	Rp144.844.000,00
5.2.02.05.02.0006	belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use)	Rp390.848.120,00
5.2.02.05.02.0007	belanja modal alat pemadam kebakaran	Rp20.500.000,00
5.2.02.07	belanja modal alat kedokteran dan kesehatan	Rp3.250.069.100,00
5.2.02.07.01	belanja modal alat kedokteran	Rp214.298.999,00
5.2.02.07.01.0001	belanja modal alat kedokteran umum	Rp214.298.999,00
5.2.02.07.02	belanja modal alat kesehatan umum	Rp3.035.770.101,00
5.2.02.07.02.0005	belanja modal alat kesehatan umum lainnya	Rp3.035.770.101,00
5.2.02.08	belanja modal alat laboratorium	Rp470.955.000,00
5.2.02.08.03	belanja modal alat peraga praktek sekolah	Rp470.955.000,00
5.2.02.08.03.0015	belanja modal alat peraga paud/ tk	Rp48.000.000,00
5.2.02.08.03.0016	belanja modal alat peraga praktik sekolah lainnya	Rp422.955.000,00
5.2.02.10	belanja modal komputer	Rp818.953.083,00
5.2.02.10.01	belanja modal komputer unit	Rp270.369.250,00
5.2.02.10.01.0002	belanja modal personal computer	Rp103.974.250,00

5.2.02.10.01.0003	belanja modal komputer unit lainnya	Rp166.395.000,00
5.2.02.10.02	belanja modal peralatan komputer	Rp548.583.833,00
5.2.02.10.02.0003	belanja modal peralatan personal computer	Rp7.500.000,00
5.2.02.10.02.0005	belanja modal peralatan komputer lainnya	Rp541.083.833,00
5.2.02.11	belanja modal alat eksplorasi	Rp0,00
5.2.02.11.02	belanja modal alat eksplorasi geofisika	Rp0,00
5.2.02.11.02.0002	belanja modal elektronik/electric	Rp0,00
5.2.02.15	belanja modal alat keselamatan kerja	Rp8.750.000,00
5.2.02.15.02	belanja modal alat pelindung	Rp8.750.000,00
5.2.02.15.02.0006	belanja modal alat pelindung lainnya	Rp8.750.000,00
5.2.02.16	belanja modal alat peraga	Rp91.099.842,00
5.2.02.16.01	belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan	Rp91.099.842,00
5.2.02.16.01.0002	belanja modal alat peraga percontohan	Rp54.605.000,00
5.2.02.16.01.0003	belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya	Rp36.494.842,00
5.2.02.18	belanja modal rambu- rambu	Rp239.368.750,00
5.2.02.18.01	belanja modal rambu- rambu lalu lintas darat	Rp239.368.750,00
5.2.02.18.01.0003	belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya	Rp239.368.750,00
5.2.02.88	belanja modal peralatan dan mesin bos	Rp1.885.528.860,00
5.2.02.88.88	belanja modal peralatan dan mesin bos	Rp1.885.528.860,00
5.2.02.88.88.8888	belanja modal peralatan dan mesin bos	Rp1.885.528.860,00
5.2.02.99	belanja modal peralatan dan mesin blud	Rp1.140.100.500,00
5.2.02.99.99	belanja modal peralatan dan mesin blud	Rp1.140.100.500,00
5.2.02.99.99.9999	belanja modal peralatan dan mesin blud	Rp1.140.100.500,00
5.2.03	belanja modal gedung dan bangunan	Rp29.651.881.243,00
5.2.03.01	belanja modal bangunan gedung	Rp29.083.781.243,00

5.2.03.01.01	belanja modal bangunan gedung tempat kerja	Rp29.083.781.243,00
5.2.03.01.01.0001	belanja modal bangunan gedung kantor	Rp530.000.000,00
5.2.03.01.01.0005	belanja modal bangunan gedung laboratorium	Rp14.214.823.444,00
5.2.03.01.01.0006	belanja modal bangunan kesehatan	Rp7.574.536.399,00
5.2.03.01.01.0008	belanja modal bangunan gedung tempat ibadah	Rp100.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan	Rp3.364.421.400,00
5.2.03.01.01.0012	belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar	Rp655.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	belanja modal bangunan fasilitas umum	Rp375.000.000,00
5.2.03.01.01.0033	belanja modal bangunan parkir	Rp2.270.000.000,00
5.2.03.04	belanja modal tugu titik kontrol/pasti	Rp301.600.000,00
5.2.03.04.01	belanja modal tugu/tanda batas	Rp301.600.000,00
5.2.03.04.01.0004	belanja modal pagar	Rp301.600.000,00
5.2.03.99	belanja modal gedung dan bangunan blud	Rp266.500.000,00
5.2.03.99.99	belanja modal gedung dan bangunan blud	Rp266.500.000,00
5.2.03.99.99.9999	belanja modal gedung dan bangunan blud	Rp266.500.000,00
5.2.04	belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	Rp27.628.795.809,00
5.2.04.01	belanja modal jalan dan jembatan	Rp13.846.139.559,00
5.2.04.01.01	belanja modal jalan	Rp13.846.139.559,00
5.2.04.01.01.0004	belanja modal jalan kota	Rp9.786.139.559,00
5.2.04.01.01.0005	belanja modal jalan desa	Rp4.060.000.000,00
5.2.04.02	belanja modal bangunan air	Rp12.426.262.500,00
5.2.04.02.01	belanja modal bangunan air irigasi	Rp1.590.000.000,00
5.2.04.02.01.0008	belanja modal bangunan air irigasi lainnya	Rp1.590.000.000,00
5.2.04.02.04	belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam	Rp100.000.000,00

5.2.04.02.04.0005	belanja modal bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai	Rp100.000.000,00
5.2.04.02.07	belanja modal bangunan air kotor	Rp10.736.262.500,00
5.2.04.02.07.0001	belanja modal bangunan pembawa air kotor	Rp10.736.262.500,00
5.2.04.03	belanja modal instalasi	Rp410.000.000,00
5.2.04.03.01	belanja modal instalasi air bersih/air baku	Rp400.000.000,00
5.2.04.03.01.0003	belanja modal instalasi air tanah dalam	Rp400.000.000,00
5.2.04.03.04	belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan	Rp10.000.000,00
5.2.04.03.04.0001	belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan	Rp10.000.000,00
5.2.04.04	belanja modal jaringan	Rp896.393.750,00
5.2.04.04.01	belanja modal jaringan air minum	Rp896.393.750,00
5.2.04.04.01.0005	belanja modal jaringan air minum lainnya	Rp896.393.750,00
5.2.04.99	belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD	Rp50.000.000,00
5.2.04.99.99	belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD	Rp50.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD	Rp50.000.000,00
5.2.05	belanja modal aset tetap lainnya	Rp1.168.190.000,00
5.2.05.01	belanja modal bahan perpustakaan	Rp14.550.000,00
5.2.05.01.01	belanja modal bahan perpustakaan tercetak	Rp14.550.000,00
5.2.05.01.01.0001	belanja modal buku umum	Rp14.550.000,00
5.2.05.02	belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	Rp1.000.000,00
5.2.05.02.02	belanja modal alat bercorak kebudayaan	Rp1.000.000,00
5.2.05.02.02.0002	belanja modal maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah	Rp1.000.000,00
5.2.05.88	belanja modal aset tetap lainnya bos	Rp1.152.640.000,00
5.2.05.88.88	belanja modal aset tetap lainnya bos	Rp1.152.640.000,00

5.2.05.88.88.8888	belanja modal aset tetap lainnya bos	Rp1.152.640.000,00
5.3	belanja tidak terduga	Rp1.500.000.000,00
5.3.01	belanja tidak terduga	Rp1.500.000.000,00
5.3.01.01	belanja tidak terduga	Rp1.500.000.000,00
5.3.01.01.01	belanja tidak terduga	Rp1.500.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	belanja tidak terduga	Rp1.500.000.000,00
5.4	belanja transfer	Rp87.735.866.791,00
5.4.01	belanja bagi hasil	Rp2.041.174.572,00
5.4.01.01	belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa	Rp1.204.000.000,00
5.4.01.01.03	belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa	Rp1.204.000.000,00
5.4.01.01.03.0001	belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa	Rp1.204.000.000,00
5.4.01.02	belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa	Rp837.174.572,00
5.4.01.02.01	belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa	Rp837.174.572,00
5.4.01.02.01.0001	belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa	Rp837.174.572,00
5.4.02	belanja bantuan keuangan	Rp85.694.692.219,00
5.4.02.01	belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi	Rp3.679.657.224,00
5.4.02.01.02	belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi	Rp3.679.657.224,00
5.4.02.01.02.0001	belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi	Rp3.679.657.224,00
5.4.02.05	belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa	Rp82.015.034.995,00

5.4.02.05.02	belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Rp82.015.034.995,00
5.4.02.05.02.0004	belanja bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp40.075.236.000,00
5.4.02.05.02.0005	belanja bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	Rp41.939.798.995,00
	Jumlah Belanja	Rp685.364.466.101,00
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp28.500.000.000,00)
6	Pembiayaan Daerah	
6.1	penerimaan Pembiayaan	Rp28.500.000.000,00
6.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya	Rp28.500.000.000,00
6.1.01.05	penghematan belanja	Rp28.500.000.000,00
6.1.01.05.01	penghematan belanja-Belanja Operasi	Rp28.500.000.000,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	Rp28.500.000.000,00
	jumlah pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00
	Pembiayaan netto	Rp28.500.000.000,00
6.3	SILPA Tahun Berkenaan	Rp0,00

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,


ROBERIA